

SKRIPSI
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ZAHRA RAMADHANI FITRI SHADIAH
2210119003

Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)



Pembimbing:

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No. Reg: 22/PK-VIII/IV/2026

	No. Alumni Universitas		Zahra Ramadhani Fitri Shadih		No. Alumni Fakultas	
	a. Tempat/Tgl Lahir	:	Muara Siberut/ 22 Oktober 2004	f. Tanggal Lulus	:	19 Agustus 2026
	b. Nama Orang Tua	:	Ali Yusuf dan Yurnani	g. Predikat Lulus	:	Dengan Pujian
	c. Fakultas	:	Hukum	h. Lama Studi	:	4 Tahun
	d. PK	:	Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam	i. IPK	:	3,85
	e. No. BP	:	2210119003	j. Alamat	:	Jl. Sawah Lua

PENGELOLAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

(Zahra Ramadhani Fitri Shadih, 2210119003, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum tersedianya TPS 3R, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar teknis, serta masih digunakannya sistem *open dumping*. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan (2) apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, memfokuskan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2022. Kegiatan pengurangan sampah baru terlaksana melalui pembatasan timbulan sampah, sedangkan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah belum berjalan optimal. Pada tahap penanganan, pengumpulan dan pengangkutan sampah telah dilaksanakan, namun pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir belum memenuhi ketentuan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi sosialisasi, pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara rutin, serta perencanaan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah, Kabupaten Kepulauan Mentawai.*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 19 Agustus 2026 Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama Terang	Romi, S.H., M.H	Amelia Zulfithri, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: Hendria Fithrina, S.H., M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Zahra Ramadhani Fitri Shadih	Alumni Faculty Number
	a. Place/Date of Birth :	Muara Siberut/ October 22 nd , 2004	f. Graduation Date : Agustus 19 th , 2026
	b. Parents' Names :	Ali Yusuf and Yurnani	g. Pass Predicate : Cumlaude
	c. Faculty :	Law	h. Length of Study : 4 Years
	d. CP :	Agrarian and Natural Resources Law	i. GPA : 3,85
	e. No. BP :	2210119003	j. Address : Sawah Lua Street

WASTE MANAGEMENT IN MENTAWAI ISLANDS REGENCY

(Zahra Ramadhani Fitri Shadih, 2210119003, Faculty of Law, Andalas University, 82 pages, 2026)

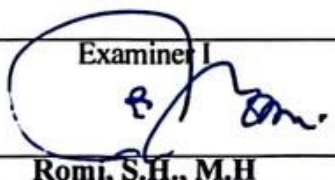
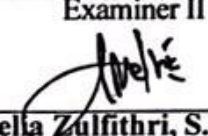
ABSTRACT

Waste management is a mandatory government affair in the field of environment which is the authority of the local government as regulated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. Mentawai Islands Regency has stipulated Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Waste Management, but in its implementation various obstacles are still found, such as the unavailability of 3R TPS, Final Processing Sites (TPA) that meet technical standards, and the open dumping system is still used. Based on these conditions, the formulation of the problem in this study is: (1) how to implement waste management in Mentawai Islands Regency; and (2) what are the obstacles and efforts made by the Regional Government of Mentawai Islands Regency in the implementation of waste management. This research uses an empirical juridical method, focusing on data obtained directly from the field, data collection techniques are carried out through interviews and document studies, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the implementation of waste management in Mentawai Islands Regency has not been fully in accordance with Law Number 18 of 2008, Government Regulation Number 81 of 2012, and Mentawai Islands Regency Regional Regulation Number 1 of 2022. Waste reduction activities are only carried out through restrictions on waste generation, while waste recycling and reuse have not run optimally. At the stage of handling, collecting and transporting waste has been carried out, but the sorting, processing, and final processing have not met the requirements due to limited facilities and infrastructure. The obstacles found include limited facilities and infrastructure, geographical conditions of the archipelago, and low community participation. The efforts made by the local government include socialization, regular waste collection and transportation services, as well as planning the construction of an Integrated Waste Management Site (TPST).

Keywords: Waste Management, Local Government, Mentawai Islands Regency.

This thesis has been defended in front of the Examiner Team and was declared passed on August 19th, 2026

Examiner,

Signature	Examiner I 	Examiner II 
Bright Name	Romi, S.H., M.H	Amella Zulfithri, S.H., M.H

Knowing,

Head of the Department of Administrative Law: Hendria Fithrina, S.H., M.H


Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

	Faculty/University Officer	
No. Faculty Alumni	Name:	Signature:
University Alumni No.	Name:	Signature: